

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena berada pada posisi geopolitis penting yakni diantara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Ditambah lagi dengan luas wilayahnya yang hampir 70% merupakan lautan sehingga memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Wilayah maritim Indonesia terdiri dari 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi daerah kepulauan, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Sementara itu panjang garis pantainya mencapai 81.000 kilometer. (Koya, 2009)

Wilayah pesisir dan lautan merupakan bagian dari lingkungan hidup kita yang berpotensi besar dalam menyediakan ruang hidup dan sumber daya kehidupan. Sejak zaman prasejarah wilayah pesisir dan perairan pantai telah menjadi wadah kehidupan bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama Indonesia. Berbagai kemudahan yang disediakan, diantaranya lahan yang pada umumnya landai, perairan sebagai sumber pangan, dan kemudahan transportasi melalui perairan pantai dengan sungai-sungainya yang relatif dalam, lebar dan tenang telah menjadi daya tarik yang kuat bagi manusia untuk bermukim di kawasan pantai.

Kecenderungan ini terus berjalan hingga sekarang dimana sekitar 60% kota-kota besar di Indonesia terletak di wilayah pesisir. (Beangen, 2004:3) Ketersediaan wilayah pesisir dan laut bagi kesejahteraan manusia harus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkannya harus ada pemahaman terhadap wilayah ini dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Ironisnya pembangunan kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Bidang kelautan yang mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim dan jasa kelautan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan nasional. (Kusumastanto, 2003)

Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupan dari hasil laut. Ketertinggalan sektor kelautan terutama dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan ketertinggalan nelayan yang paling parah bila dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Meskipun mereka telah bekerja keras melawan terpaan gelombang laut yang dahsyat untuk mendapatkan ikan, namun mereka tetap harus bergelut dengan kemiskinan. Mereka hanya dapat memanfaatkan sekitar 20 hari dalam sebulan untuk melaut dan menghabiskan sisanya dengan memperbaiki kapal dan jala. Karena lebih banyak menghabiskan waktu di laut untuk mencari nafkah, masyarakat ini relatif kurang memikirkan pendidikan. Memasuki usia remaja anak-anak mulai diajak orang tua mereka untuk ikut melaut sehingga praktis anak-anak akan meninggalkan bangku sekolah.

Pekerjaan sebagai nelayan biasanya merupakan pekerjaan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya sehingga biasanya tidak banyak perubahan dalam keluarga masyarakat. Masyarakat sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu kelas pemilik atau juragan dan kelas pekerja. Kelas juragan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik karena memiliki kapal, mesin dan alat tangkap yang memadai, serta modal yang cukup. Sedangkan kelas pekerja menerima upah dari kelas pemilik berupa bagian dari keuntungan bersih yang didapat dari melaut. Biasanya kapal dan alat tangkap yang mereka miliki masih bersifat konvensional sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah. (Badiran, 2009)

Aspek-aspek ini sangat mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat karena dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha perikanan yang dilakukan. Karena usaha perikanan sangat tergantung pada musim, harga dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir tergantung kondisi ekosistem dan lingkungan yang rentan pada kerusakan, khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan. Berdasarkan pengamatan langsung, degradasi lingkungan pesisir di daerah kota Bandar Lampung ini terlihat dari tercemarnya perairan Teluk Lampung. Perairan ini sudah tercemar limbah dari pabrik dan rumah tangga serta sampah. Pencemaran limbah itu berasal dari buangan sungai-sungai dan sampah-sampah yang dibuang di sepanjang pesisir Teluk Lampung. Dampaknya, terumbu karang kini sudah sulit dijumpai di dasar Teluk Lampung, sementara hutan bakau yang tersisa tinggal dua hektar. Selain itu banjir setinggi 10 sentimeter di wilayah pesisir selalu terjadi saat musim hujan dan pasang naik.

Selain itu masyarakat juga sangat tergantung pada musim sehingga mereka sangat sibuk pada musim penangkapan sementara pada musim paceklik mereka mencari kegiatan lain atau menganggur. Oleh karena itu pendapatan masyarakat sangat fluktuatif dan tercermin juga dari pola hidup mereka. Pada musim panen mereka cenderung hidup berfoya-foya dan pada musim paceklik mereka banyak terlibat utang pada tengkulak atau rentenir.

Faktor cuaca juga sangat mempengaruhi aktivitas para nelayan tradisional. Banyak nelayan tidak melaut jika terjadi gelombang dan angin kencang. Akibat ombak yang tingginya antara satu sampai dua meter nelayan hanya bisa mencari ikan di perairan yang tidak jauh dari pantai. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan mereka. Ketika cuaca normal, satu perahu kecil dapat menangkap 2,5 – 3 kuintal ikan per hari. Namun akibat cuaca buruk ini rata-rata ikan yang dapat ditangkap kurang dari 1 kuintal per hari.

Masyarakat juga sangat peka terhadap fluktuasi harga dimana perubahan harga sangat mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Misalnya kenaikan harga bahan bakar membuat banyak nelayan tidak melaut karena tidak sanggup membeli solar. Maraknya pencurian ikan yang masih merajalela dan arus impor ikan yang masuk ke pasar tradisional semakin menurunkan pendapatan para nelayan tradisional.

Karakteristik dan dinamika yang khas pada masyarakat pesisir terlihat dari kemiskinan dan ketertinggalan mereka. Realitas ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah karena tingkat pendidikan

formal yang masih rendah. Selain itu banyak masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat juga belum mampu menerapkan inovasi dan teknologi karena keterbatasan investasi. Misalnya nelayan masih menggunakan es dan garam untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka karena tidak mempunyai modal untuk membeli mesin pendingin (*cold storage*). Karena itu ikan hasil tangkapan mereka hanya bisa disimpan kurang dari seminggu. Padahal dengan mesin pendingin mereka bisa menyimpan ikan dari satu hingga sembilan bulan.

Dahuri (2012) mengungkapkan saat ini sektor perikanan di Indonesia sedang mengalami tiga masalah besar. Pertama adanya peningkatan pengangguran karena nelayan semakin sulit melaut. Kedua, arus impor ikan yang masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga ikan lokal semakin memukul daya saing nelayan. Ironisnya, ikan-ikan yang masuk tersebut diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa jenis ikan impor dari Thailand dan Vietnam yang sedang marak masuk seperti ikan layang dan kembung justru sulit menemukan di perairan negara-negara tersebut. Masalah ketiga adalah penangkapan ikan ilegal yang makin merajalela. Ketertinggalan teknologi dan alat tangkap kapal nelayan membuat daya jelajah nelayan kurang optimal. Lemahnya daya saing kapal nelayan Indonesia membuat perairan kita rawan dimasuki nelayan asing.

Salah satu amanat reformasi adalah pemberdayaan masyarakat yang tertinggal dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Sudah selayaknya

semua golongan masyarakat mendapat kepastian akan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini juga berlaku pada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dengan mata pencaharian nelayan ataupun petani ikan. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini secara ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat Indonesia. Sementara itu, masyarakat di wilayah pesisir adalah kelompok yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan sehingga taraf kesejahteraannya paling tertinggal.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memikirkan strategi dan kebijakan pendidikan yang tepat bagi kelompok masyarakat ini dengan memetakan permasalahan dari yang bersifat mikro sampai makro. Permasalahan mikro yang dimaksud adalah persoalan internal masyarakat seperti sosial, budaya, mentalitas dan sebagainya yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di wilayah pesisir.

Pembangunan masyarakat nelayan tersebut mengalami berbagai kendala yang cukup berat, antara lain karena kurangnya prasarana fisik, terbatasnya keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendapatan, kelangkaan lembaga keuangan yang dapat membantu permodalan nelayan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan serta terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan dan koordinasi antara pelaksana pembangunan, terutama pada masyarakat nelayan sendiri. Strategi yang harus diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah dengan membantu mereka untuk berkembang atas dasar kemampuan mereka sendiri sekaligus mengembangkan potensi lingkungan sekitar.

Sektor perikanan harus dibenahi melalui pendidikan karena usaha perikanan memiliki sifat yang khusus. Untuk masuk ke bidang ini dibutuhkan energi yang besar dan lokasinya pun jauh di tengah lautan. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian yang bagus, dengan fisik yang kuat dan baik, serta teknologi yang tinggi. Jadi untuk menghasilkan sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan yang tangguh sebaiknya berasal dari komunitas kelautan dan perikanan itu sendiri.

Anak-anak nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang sejak usia 0-15 tahun sudah merasakan udara laut dan hidup di lingkungan laut memiliki kearifan lokal. Anak-anak inilah yang seharusnya bersekolah di bidang kelautan dan perikanan. Dengan ilmu dan kearifan lokal yang mereka miliki dan jika mereka dididik secara militer, maka mereka akan siap secara mental, teknologi dan keterampilan untuk bekerja di dunia kelautan dan perikanan

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Teluk Lampung Bandar Lampung berbeda dengan masyarakat lain karena penduduknya yang heterogen terutama dari latar belakang suku. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah masyarakat pendatang seperti suku Sunda, Jawa, Bugis dan Flores. Meskipun demikian masih banyak terdapat masyarakat asli Lampung di daerah ini. Selain mencari nafkah sebagai nelayan, ada juga masyarakat pesisir Teluk Lampung yang hidup dengan mengolah ikan hasil tangkapan, seperti yang ada di daerah Pulau Pasaran. Di pulau ini ikan hasil tangkapan diolah menjadi ikan kering oleh kaum ibu dan remaja putrinya. Berdasarkan pra survei yang penulis lakukan di daerah ini,

aktivitas pengolahan ikan dilakukan mulai pagi hingga sore hari dengan mengandalkan sinar matahari. Ikan yang telah diolah kemudian dijual kembali kepada para pemborong yang datang ke pulau ini. Jika musim tangkap tiba dan banyak pesanan dari para pemborong, biasanya orang tua kekurangan tenaga untuk mengolah dan mengeringkan ikan sehingga menyuruh anak-anak mereka untuk ikut membantu. Akibatnya banyak anak yang tidak masuk sekolah selama sehari-hari. Tingkat pendidikan anak-anak nelayan sebagian besar masih rendah. Kurangnya partisipasi orang tua dan keterbatasan biaya membuat anak-anak tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai.

Persentase anak yang sekolah ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu rasio jumlah siswa yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan juga merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Anak yang tidak atau putus sekolah ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa pada tahun 2010 jumlah anak putus sekolah untuk pendidikan dasar tingkat menengah (SMP) diperkirakan mencapai 29,64 persen. Untuk tingkat sekolah dasar (SD) di Bandar Lampung APKnya adalah 111.18 persen, sementara APMnya 93.903 persen. Jumlah itu didapat dari anak usia sekolah berusia 7 hingga 13 tahun di Bandar Lampung yang mencapai 97.585 orang anak.

Dari hasil pra survey yang dilakukan pada tiga kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat, yaitu Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Keteguhan, hanya kelurahan Sukamaju yang mempunyai data anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Sedangkan dua kelurahan lainnya tidak mempunyai data ini. Dari data Kelurahan Sukamaju diketahui bahwa untuk anak usia pendidikan dasar usia 7 sampai 15 tahun terdapat 1192 orang anak yang bersekolah dan 76 orang anak yang tidak bersekolah. Atau dengan kata lain Angka Partisipasi Kasar (APK) di kelurahan ini mencapai 94 persen. Berikut ini adalah tabel anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah di tiga kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Tidak Bersekolah di Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Keteguhan.

No.	Kelurahan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Tidak Bersekolah	Keterangan *
1.	Kota Karang	*	Tidak ada data
2.	Sukamaju	1192	
3.	Keteguhan	*	
	Jumlah	1192	

Sumber: data yang diolah dari kantor Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Keteguhan.

Melihat kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti penerapan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di wilayah pesisir ini. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada masyarakat yang tinggal di pesisir Teluk Lampung. Karena luasnya wilayah Teluk Lampung yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran maka penelitian ini hanya difokuskan pada daerah pesisir Teluk Lampung yang termasuk dalam wilayah

Kota Bandar Lampung. Penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai penelitian karena belum banyak penelitian mengenai kebijakan pendidikan pada masyarakat. Yang selama ini banyak dijumpai adalah pemberdayaan bidang ekonomi berupa pemberian modal dan pendirian koperasi nelayan. Sebenarnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyediakan banyak fasilitas dan bantuan seperti pendirian sekolah dan kelompok belajar (Kejar Paket) yang berorientasi pada masyarakat. Sayangnya mereka kurang memanfaatkan fasilitas tersebut. Padahal pendidikan yang ditempuh seseorang memiliki banyak manfaat, diantaranya membantu murid dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri, memberikan nasihat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan, membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis dengan latihan serta membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus utama penelitian ini adalah implementasi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Adapun sub fokus adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah pendidikan dasar pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- 1.2.2 Bagaimanakah keadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

- 1.2.3 Bagaimanakah peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan terhadap terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- 1.2.4 Apa faktor-faktor pendukung terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung.
- 1.2.5 Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

- 1.3.1 Pendidikan dasar pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- 1.3.2 Sarana dan prasarana pendidikan di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- 1.3.3 Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan terhadap terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- 1.3.4 Faktor-faktor pendukung terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung.
- 1.3.5 Kendala dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada masyarakat di pesisir Teluk Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- 1.4.1 Secara teoritis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen pendidikan.
- 1.4.2 Secara praktis, sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pengambilan kebijakan pendidikan dasar bagi masyarakat di wilayah pesisir, serta bagi masyarakat secara umum dan nelayan secara khusus.

1.5 Definisi Istilah

Untuk memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan pengertian istilah dalam kalimat judul. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Implementasi: penerapan atau pelaksanaan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penerapan atau pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 1.5.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: suatu program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun.
- 1.5.3 Wilayah pesisir: suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dalam penelitian ini wilayah pesisir yang dimaksud adalah wilayah pesisir yang masuk dalam daerah kota Bandar Lampung yang meliputi kecamatan Panjang, kecamatan Teluk Betung Selatan dan kecamatan Teluk Betung

Barat. Sedangkan yang menjadi wilayah penelitian adalah Kecamatan Teluk Betung Barat.

- 1.5.4 Teluk Lampung: wilayah lautan yang menjorok ke darat, yang terbentang dari daerah Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) sampai ke daerah Punduh Pidada (Kabupaten Pesawaran).